

**ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
SEBAGAI CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA**

(STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Nama : Teguh Indiarto Supomo
NPM : 1905180028
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : TEGUH INDIARTO SUPOMO
NPM : 1905180028
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN DELI SERDANG)

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si.)

Penguji II

(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.)

Pembimbing

(MUKMIN POHAN, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si., CMA.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE, M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : TEGUH INDIARTO SUPOMO

NPM : 1905180028

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : Jl. B. Z. HAMID KOMPLEK LAGUNA INDAH NO.17
BLOK C

Judul : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA SEBAGAI CAPAIAN EKONOMI DI INDONESIA
(Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

MUKMIN POHAN, SE, M.Si.

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. HO JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TEGUH INDIARTO SUPOMO
NPM : 1905180028
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. B. Z. HAMID KOMPLEK LAGUNA INDAH NO. 17 BLOK C MEDAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/06-2023	Ganti Judul Revisi Bab 1 Perbaiki Identifikasi masalah, Batasan masalah sampai manfaat Penelitian		
21/07-2023	Revisi Bab 2 Menambahkan Teori Tentang Indeks Pembangunan manusia sampai Pembangunan ekonomi		
28/07-2023	Revisi Bab 3 mulai dari jenis Penelitian-analisis data		
11/08-2023	Acc Lanjut Bab 4		
21/08-2023	Revisi Bab 4 tentang kondisi geografis Revisi Bab 5 Penulisan kesimpulan		
25/08-2023	Acc Sidang		

Pembimbing Skripsi

MUKMIN POHAN, SE., M.Si

Medan, Agustus 2023
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TEGUH INDIARTO SUPOMO
NPM : 1905180028
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : ANALISIS PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA SEBAGAI CAPAIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DI INDONESIA (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



TEGUH INDIARTO SUPOMO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa ekonomi secara deskriptif terkait IPM dan komponen-komponen indeks yang menghitung angka IPM. Melakukan estimasi terkait pengaruh DAU, DAK, DBH dan PDRB perkapita terhadap IPM di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 – 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode OLS (*Ordinary Least Square*) berupa regresi linier berganda (*multiple regression model*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Deli Serdang mencapai 75,53 pada tahun 2022. Dengan capaian IPM itu, Deli Serdang berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Deli Serdang pada posisi 4 (empat) dari 33 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara. Disamping itu, DBH, DAU, DAK, dan PDRB perkapita berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap IPM.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Deli Serdang, PDRB

ABSTRACT

This study aims to carry out a descriptive economic analysis related to the HDI and the components of the index that calculate the HDI number. Estimating the influence of DAU, DAK, DBH and per capita GRDP on HDI in Deli Serdang Regency in 2013 – 2022. This research method uses the least squares method or the OLS (Ordinary Least Square) method in the form of multiple linear regression (multiple regression model). The results of this study indicate that the Deli Serdang Human Development Index will reach 75.53 in 2022. With this HDI achievement, Deli Serdang is in the "high" category of human development status. Not only that, this achievement also brought Deli Serdang to position 4 (four) out of 33 Regencies/Cities in achieving human development in North Sumatra. Besides that, DBH, DAU, DAK, and GRDP per capita simultaneously influence HDI.

Keywords: Human Development Index, Deli Serdang, GRDP

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian yang berjudul “**Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Capaian Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Deli Serdang)**”. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada jungjunan dan panutan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya.

Dengan selesainya penulisan skripsi penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada saya. Dan atas izin-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi penelitian ini.
2. Ibu saya Lenny Elvina, yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi penyemangat saya, memberikan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi dan menjadi orang tua yang hebat selama hidup saya.
3. Bapak Dr. Agussani, M. Ap. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Msi., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Ibu Dra. Roswita Hafni, M. Si., selaku Sekretaris Prodi

Ekonomi Pembangunan Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Mukmin Pohan, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberi semangat dan masukan kepada saya, dan dengan penuh kesabaran membimbing saya.
7. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
8. Bapak dan Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam akademik.
9. Adik Saya Trisna Monica Supomo dan seluruh Keluarga Besar Saya yang memberikan saya semangat dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Kepada teman-teman seperbimbingan tugas akhir saya Dhivia Prisasti yang juga membantu saya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini, serta rekan sekelas masa perkuliahan yang memberi semangat kepada saya.
11. Kepada sahabat saya Tiara Agusti Rani dan Luthfiah Anggraini Putri yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya serta turut membantu saya dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
12. Dan semua pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan dengan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran positif yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif serta menambah referensi bagi yang membutuhkan.

Terima kasih, Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 25 Mei 2023

Penulis

Teguh Indiarso Supomo

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Batasan Masalah.....	15
1.4 Rumusan Masalah.....	15
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Landasan Teori.....	16
2.1.1. Pembangunan Ekonomi.....	16
2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia.....	27
2.1.3. Pengeluaran Pemerintah.....	37
2.2. Regulasi Kebijakan Mendukung IPM.....	45
2.3. Penelitian Terdahulu.....	52
2.4. Kerangka Penelitian.....	56
2.4.1. Tahapan Penelitian.....	56
2.4.2. Kerangka Konseptual.....	56
2.4.3. Hipotesis.....	57
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	58
3.1. Pendekatan Penelitian.....	58
3.2. Definisi Operasional.....	58
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	59
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	59
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	60
3.6. Teknik Analisis.....	60
3.6.1. Analisis Deskriptif.....	60
3.6.2. Metode Analisis Model Ekonometrika.....	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	68
4.1.1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi.....	68
4.1.2. Demografi	69
4.2 Perkembangan IPM Yang Telah Dicapai Dari Proses Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Deli Serdang	71
4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang	71
4.2.2. Posisi Kabupaten Deli Serdang	72
4.2.3. Umur Harapan Hidup	74
4.2.4. Pendidikan	76
4.3 Faktor Yang Mempengaruhi IPM Dikabupaten Deli Serdang	78
4.3.1 Uji Asumsi Klasik	78
4.3.2 Regresi Linear Berganda	80
4.2.3 Uji Hipotesis	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	11
Tabel 1.2 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022	12
Tabel 1.3 Indikator Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara.....	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	52
Tabel 3.1 Definisi Operasional	58

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	41
Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman	43
Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat.....	44
Gambar 2.4 Tahapan Penelitian	56
Gambar 2.5 Kerangka Konseptual	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bukanlah sebuah topik baru di dalam ilmu ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, studi tentang pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ekonom sejak zaman Merkantilis, Klasik, Marx dan Keynes. Bapak ilmu ekonomi, Adam Smith misalnya, telah menyinggung berbagai aspek tentang pembangunan ekonomi dalam karyanya yang berjudul *The Wealth of Nations*. Oleh karena itu, tidaklah tepat jikalau menganggap bahwa ekonomi pembangunan merupakan suatu bidang analisis yang relatif baru dalam ilmu ekonomi. Akan tetapi, lebih tepat jika dikatakan bahwa analisis-analisis tentang masalah pembangunan yang dilakukan oleh para ekonom sekarang ini adalah sebagai suatu “kebangkitan kembali” untuk memperhatikan masalah - masalah yang dianalisis oleh para ekonom terdahulu (Arsyad, 2015).

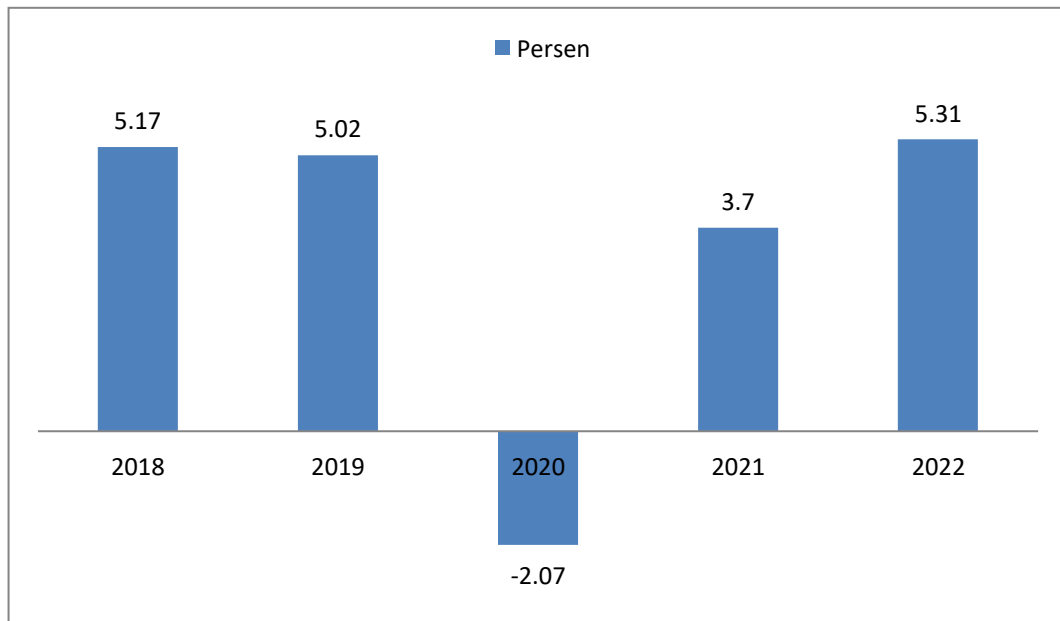
Kuncoro (2018) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya membangun seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai salah satu tujuan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pembangunan sebagai refleksi pengamalan Pancasila, khususnya menanamkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu upaya meningkatkan pembangunan dan hasilnya menuju kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya relatif statis dalam waktu yang cukup lama

untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan tingkat pertumbuhan GNP dari 5 tahun menjadi 5 tahun, 7%/tahun atau lebih. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan meningkatnya pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi dianggap oleh sebagian besar ahli ekonomi sebagai indikator yang paling tepat untuk menggambarkan proses pembangunan suatu negara (Arsyad, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mengukur kinerja dan perkembangan ekonomi dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produksi barang dan jasa di negara tersebut. Proses produksi barang dan jasa dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dan penduduk negara lain (Sukirno, 2017).

Pertumbuhan atau penurunan PDB mengindikasikan adanya peningkatan atau penurunan produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Peningkatan PDB mencerminkan semangat perekonomian suatu negara karena ekonominya telah bergeser dan berkembang untuk akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018 - 2022 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,31% menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi sejak tahun 2018 yang tumbuh sebesar 5,17%. Sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02% dan pada tahun 2020 saat pandemic covid-19 melanda Indonesia pergerakan ekonomi Indonesia berjalan melambat. Pergerakan ekonomi yang melambat ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak baik, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh pertumbuhan minus yaitu -2,07%. Namun, pada tahun 2021 perekonomian Indonesia mulai membaik dimana terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tumbuh positif menjadi 3,7%. Kebangkitan ekonomi akibat pandemi covid-19 merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan *recovery* pasca pandemic covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mulai membaik tentu saja tidak lepas dari peran serta seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Indikator penting kondisi suatu daerah pada suatu periode tertentu diwakili oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin besar potensinya. Perkembangan PDRB menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di suatu daerah untuk mendorong peningkatan produksi daerah. Salah satu kebijakan ekonomi adalah mengatur pendapatan dan pengeluaran suatu daerah (Sukirno, 2017).

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah akan berdampak pada perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga indikator kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan hal yang penting untuk di analisis. Perdebatan tentang indikator pembangunan sosial-ekonomi sudah sejak lama terjadi. Pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan telah digugat oleh kalangan ekonomi maupun non-ekonomi yang melihat ketidakakuratan indikator tersebut, yang kemudian memunculkan beberapa indikator baru. Indikator baru secara umum berfokus pada pembangunan manusia. Morris (1979) membangun *the Physical Quality of Life Index (PQLI)*, sedangkan *United Nation Development Program (UNDP)* membangun *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negaranegara di dunia dengan landasan yang dibangun oleh Haq (1996).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak (Setiawan & Hakim, 2013).

Konsep IPM pertama kali dipublikasikan UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Secara spesifik UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan memberdayakan (*empowerment*).

IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara di lihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang di tentukan oleh pertumbuhan

ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga indeks pembangunan manusia akan meningkat. Nilai indeks pembangunan manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara (Asnidar, 2018).

Indeks pembangunan manusia yaitu indikator kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah kurun waktu tertentu. Indeks pembangunan manusia yakni akumulasi dari tingkat pendidikan, kesejahteraan dan kelayakan hidup. Dalam suatu daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia tinggi menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia yang baik.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yakni :

1. Modal, peralatan fisik dan sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi

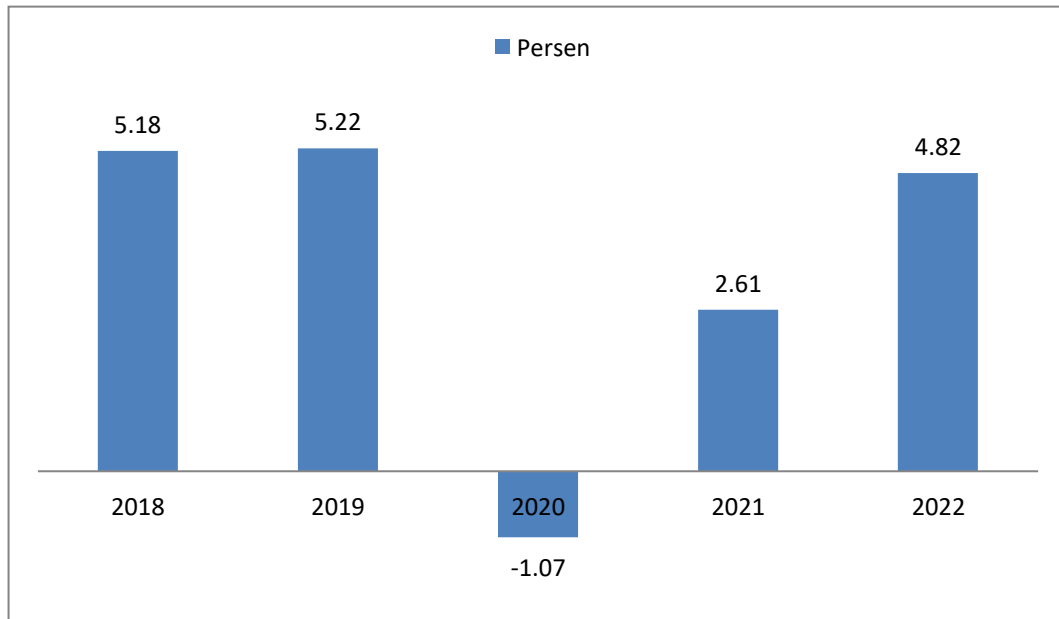
Pembangunan adalah proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang berdasar dalam kebutuhan setiap daerah sehingga akan terwujud perubahan ke arah yang lebih baik sesuai sasaran tujuan pembangunan. Terkait mengenai pembangunan, paradigma yang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dilihat dengan pengaruh pembangunan manusia, dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia suatu daerah. Dalam menjalani program pembangunan membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi (Dianaputra & Aswitari, 2017).

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan objek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu

wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI). Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahbub ul Haq dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui United Nation Development Programe (UNDP). Besarnya angka indeks tersebut, secara bersamaan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya IPM.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di wilayah Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Perekonomian Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional. Disamping itu, posisi provinsi Sumatera Utara yang berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional membawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Potensi yang dimiliki Sumatera Utara seharusnya dapat menjadi modal utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah ini. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara dapat di lihat dari grafik dibawah ini.

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2018 - 2022 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023

Berdasarkan grafik di atas pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Utara mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana, pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,22%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,07%. Pertumbuhan minus tersebut terjadi akibat dari dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan pergerakan ekonomi terbatas dan melambat. Akan tetapi, pada tahun 2021 dan 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sudah mulai mengalami pertumbuhan yang positif. Dimana, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 2,61% dan pada tahun 2022 naik menjadi 4,82%.

Pembangunan manusia di Sumatera Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara mencapai 71,74. Angka ini meningkat sebesar 0,56 poin atau tumbuh sebesar 0,79%. Bayi yang lahir di Sumatera Utara 2019 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,95 tahun,

lebih lama 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak – anak yang pada tahun 2019 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,15 tahun. Penduduk usia 25 tahun keatas secara rata – rata telah lama menempuh pendidikan selama 9,45 tahun. Pada tahun 2019, masyarakat Sumatera Utara memiliki kebutuhan hidup dengan rata - rata pengeluaran perkapita sebesar 10,65 juta rupiah pertahun, meningkat 258 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara adalah sebesar 72.00 atau tumbuh 0,32% (Meningkat 0,23 poin) dibandingkan capaian IPM tahun 2020. Peningkatan IPM 2021 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2020, pandemi COVID – 19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,76% dibanding pada tahun 2020.

Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak - anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun atau hamper setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,04 dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 13,23 tahun. Selain itu, rata rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun keatas juga meningkat 0,04 tahun, dari 9,54 tahun menjadi 9,58 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,23 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pasca pandemi covid-19 tidak terlepas dari kontribusi di setiap wilayah kabupaten/kota yang berada di Sumatera Utara. Salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Utara wilayah pantai timur. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 1.931.441 jiwa, 22 kecamatan, 14 kelurahan dan 380 desa.

Kabupaten Deli Serdang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sebagai salah satu daerah lintas pelayaran paling sibuk di dunia. Kabupaten ini mengelilingi dua kota utama di Sumatera Utara. Dengan posisi strategis, sumber daya alam dan tenaga kerja yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang akan menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi keunggulan yang kompetitif dalam menghadapi persaingan menarik investor untuk mengembangkan usahanya di daerah ini dan sasaran lainnya dalam memasarkan produk/jasa yang dihasilkan.

Kabupaten Deli Serdang memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan. Namun dalam kenyataannya sistem otonomi daerah yang terjadi di kabupaten ini masih belum berlangsung dengan baik. Hal ini terbukti masih banyak daerah di kabupaten Deli Serdang yang belum mampu mengelola kekayaan daerahnya masing-masing dan masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Banyak daerah yang memiliki kekayaan alam seperti tempat pariwisata yang indah, namun tidak diolah dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk melihat perkembangan perekonomian kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha PDRB	2022	2021	2020	2019	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.10	2.84	0.74	4.38	5.56
B. Pertambangan dan Penggalan	4.79	4.11	-0.57	4.65	4.12
C. Industri Pengolahan	1.01	2.82	-1.92	3.82	3.63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.63	3.73	5.03	4.88	2.17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.94	7.23	3.66	3.44	2.44
F. Konstruksi	2.61	2.94	-0.74	6.69	5.18
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.63	4.15	-1.06	7.02	5.45
H. Transportasi dan Pergudangan	17.13	-5.96	-12.10	3.27	7.38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.18	-0.79	-8.46	7.98	7.97
J. Informasi dan Komunikasi	8.73	7.96	8.83	7.89	5.78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.80	4.76	2.13	1.21	1.63
L. Real Estat	3.50	-1.33	1.57	6.84	9.98
M,N. Jasa Perusahaan	7.12	-0.05	-1.69	6.87	6.64
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.26	-0.20	-0.09	6.45	6.07
P. Jasa Pendidikan	3.59	3.65	1.52	6.46	6.42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.92	-1.17	-1.32	6.63	5.73
R,S,T,U. Jasa lainnya	6.76	1.84	-3.74	6.35	5.75
PDRB	4.70	2.23	-1.78	5.18	5.15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB kabupaten Deli Serdang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kabupaten Deli Serdang sebesar 5,15% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 5,18%. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi kabupaten Deli Serdang mengalami pertumbuhan negative yaitu sebesar -1,78. Pertumbuhan minus ini diakibatkan oleh pandemi covid-19.

Pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian kabupaten Deli Serdang mulai mengalami peningkatan, hal itu terlihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 2,23% pada tahun 2021 dan 4,70% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Deli Serdang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi yang baik merupakan sesuatu yang sangat diharapkan karena dapat mengatasi masalah dalam perekonomian, contohnya adalah masalah kemiskinan, pengangguran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)			Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Sumatera Utara	69.61	69.23	69.10	13.31	13.27	13.23	72.71	72.00	71.77	9.71	9.58	9.54
Deli Serdang	72.07	71.77	71.73	13.38	13.36	13.35	76.19	75.53	75.44	10.27	10.10	10.09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2021

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2017 nilai IPM Deli Serdang sebesar 73.94 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 75.43 hingga pada tahun 2021 menjadi 75.53. Angka Harapan Hidup juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 71.11 pada tahun 2017 menjadi 71.77 pada tahun 2021. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan. Akan tetapi, Rata-rata Lama Sekolah tidak pernah mencapai harapan lama sekolah di kabupaten Deli Serdang. Dimana, rata-rata Harapan Lama

Sekolah di angka 13 sedangkan Rata-rata Lama Sekolah hanya di angka 9 sampai 10 dimana, ini tidak pernah mencapai harapan lama sekolah.

Dari komponen diatas indeks pembangunan manusia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Indeks Pembangunan Manusia terus mengalami peningkatan mulai dari 2017 sampai saat ini, karena pemerintah telah berhasil melakukan kebijakan kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat terutama di bagian bidang pendidikan, kesehatan dan memperluas lapangan kerja sehingga memberi hasil positif dalam menjamin produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dari segi pendidikan kabupaten Deli Serdang belum maksimal terlihat dari rata-rata lama sekolah belum mencapai harapan lama sekolah.

Indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan erat, karena jika indeks pembangunan manusia yang tinggi akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adapun alasan penulis meneliti tentang IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang bertujuan untuk dapat mengetahui lebih dekat tentang indeks pembangunan manusia dan dampak indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Deli Serdang. Dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia meliputi bidang pendidikan. Pembangunan ekonomi merupakan syarat tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi menjamin peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja.

Disamping itu, Indikator kemiskinan adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, seperti makanan, tempat tinggal layak, pendidikan,

dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat tertentu.

Tabel 1.3 Indikator Kemiskinan Kabupaten Deli Serdang dan Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten / Kota	Gini Ratio Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota			Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota (Persen)			Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (rupiah/kapita/bulan)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Sumatera Utara	0.3120	0.3145	0.3161	8.42	9.01	8.75	561 004	525 756	502 904
Deli Serdang	0.2700	0.2628	0.3120	3.62	4.01	3.88	448 489	428 123	413 202

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2022

Perbandingan indikator kemiskinan kabupaten Deli Serdang dan provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa *Gini Ratio* Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan. Dimana, pada tahun 2021 nilai *Gini Ratio* kabupaten Deli Serdang 0.2628 naik menjadi 0.2700. Disamping itu, dilihat dari Garis Kemiskinan kabupaten Deli Serdang masih berada dibawah Sumatera Utara. Dimana, provinsi Sumatera Utara berada diatas Rp. 500.00 perbulan sedangkan kabupaten Deli Serdang berada dibawah Rp.500.00 perbulan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator garis kemiskinan kabupaten Deli Serdang masih dibawah provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan dari data dan pengamatan diatas, penulis mengambil penelitian tentang “Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Capaian Pembangunan Ekonomi”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat beberapa permasalahan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Rata-rata Lama Sekolah belum pernah mencapai Harapan Lama Sekolah di kabupaten Deli Serdang.
2. Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan pada tahun 2022.
3. Garis Kemiskinan kabupaten Deli Serdang masih berada dibawah Sumatera Utara..

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 – 2022. Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan untuk mempermudah dalam pemecahan masalah, serta untuk menghindari luasnya pokok pembahasan. Jadi pada penelitian ini dibatasi hanya pada data indeks pembangunan manusia (IPM) berdasarkan Kabupaten Deli Serdang, yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan IPM yang telah dicapai dari proses pembangunan ekonomi di kabupaten Deli Serdang ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi IPM di kabupaten Deli Serdang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif terkait IPM dan komponen-komponen indeks yang menghitung angka IPM.

2. Melakukan estimasi terkait pengaruh DAU, DAK, DBH dan PDRB perkapita terhadap IPM di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 - 2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara kabupaten Deli Serdang, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna sebagai salah satu informasi mengenai masalah kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Arsyad (2015) Sebelum tahun 1960-an, pembangunan ekonomi diartikan sebagai kemampuan perekonomian nasional, dimana kondisinya pada mulanya relatif statis, dalam waktu yang cukup lama tumbuh dan bertahan, mempertahankan keuntungan GNP sampai dengan 5 pada. 7%/tahun atau lebih. Definisi ini sangat ekonomis. Namun konsep pembangunan ekonomi telah berubah sebagaimana pengalaman tahun 1950-an dan 1960-an sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan GNP (Produk Nasional Bruto) tidak akan mampu menyelesaikan persoalan mendasar pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat yang belum membaik meskipun target pertumbuhan PDB tahunan telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan serius dalam interpretasi sempit istilah pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, Menurut Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa keberhasilan suatu negara dalam pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai utama, yaitu (1) mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*survival*), (2) menumbuhkan rasa pengendalian diri. harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from bondage*) sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nilai-nilai inti tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Amartya Sen (1999) Peraih Nobel Ekonomi tahun 1998 berpendapat bahwa " "*Development*

can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy".

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan Negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian stabilitas perekonomian Negara (Jhingan, 2014).

Akhirnya disadari bahwa definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekadar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi bersifat multidimesi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi) saja. Pembangunan ekonomi itu dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu Negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu Negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembangaan (Arsyad, 2015).

A. Teori Pembangunan Ekonomi Aliran Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini :

a). Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industry perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

b). Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan : pertama, meningkatnya keterampilan pekerja. Kedua, penghematan waktu dalam memproduksi barang. Ketiga, penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar – menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c). Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan. “Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan

menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang ada sebelumnya. Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2014).

Maka pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengansumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna,. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut "aru" sirkuler) yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dalam lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan (Jhingan, 2014).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama

terusmenerus diruntuhkan dan struktur bar uterus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputusputus. Gerakan siklis merupakan baiaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalanannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflsioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2014).

3. David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jingan,2010).

Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “ pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat

memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi (Jhingan, 2014). Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

- a). Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
- b). Berlakunya hukum : “ *law of deminishing return* “ bagi tanah
- c). Persediaan tanah adalah tetap
- d). Permintaan gandum benar – benar inelastik
- e). Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
- f). Keadadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
- g). Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
- h). Harga penawaran buruh adalah tertentu
- i). Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
- j). Terdapat persaingan sempurna
- k). Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

B. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada umumnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengansumsikan bahwa perekonomian suatu Negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu :

1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengansumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat

produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai pasif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang akan meningkatkan output yang di produksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengansumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industry tersebut (Jhingan,20010).

C. Teori Aliran Keynesian

Ekonomi Keyensian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan

atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori keynes ini memerlukan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu *laissezfaire capitaslism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dilakukan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhingan, 2014).

Teori Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod Domar

merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja penuh. Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capitaloutput ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capitaloutput ratio = ICOR*)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang – barang modal yang bisa atau rusak (gedung, peralatan, dan bahan-bahan). Akan tetapi, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengansumsikan adanya hubungan ekonomi langsung

antara jumlah total persediaan modal, K , dan total GDP, Y misalnya, jika \$3 dari modal selamanya diperlukan untuk menghasilkan tambahan GDP tahun sebesar \$1 berarti setiap tambahan neto pada persediaan dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional (*national output*).

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia

A. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

UNDP (*United Nation Development Programme*) merumuskan “pembangunan manusia suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk”. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mewujudkan tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, berkesinambungan, pemberdayaan (Muqorrobin, 2017). Indeks pembangunan manusia yakni indikator kesejahteraan manusia dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indeks pembangunan manusia merupakan akumulasi dari tingkat pendidikan, kesejahteraan dan kelayakan hidup.

Indeks pembangunan manusia juga berperan dalam pembangunan perekonomian karena pembangunan manusia yang baik ingin menjadikan faktor-faktor Produksi. Aspek produksi yakni tercapainya tingkatan pembelajaran yang lumayan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, setelah itu dengan tercapainya tingkatan pembelajaran, maka peluang mempunyai keahlian dalam mengelola sumber energi yang ada, sehingga sumber energi yang ada bisa dikelola untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) ialah sesuatu proses dalam jangka panjang serta bermacam aspek sosial ekonomi ikut andil di dalamnya. Proses pembangunan SDM ini ialah interaksi bermakna komponen yang terjadi secara bertahap dari masa tradisional, masa pertumbuhan, hingga masa modern, alasan yang melandasi dibuatnya indeks ini yakni mencermati mutu sumber energi manusia. Pembangunan manusia yaitu sesuatu proses untuk memperbesar pilihan untuk manusia, dari definisi ini bisa diambil kesimpulan bahwa inti pembangunan suatu negara merupakan manusia sebagai peninggalan negara yang sangat berharga. Definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya meliputi ukuran pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang cuma mengutamakan pada perkembangan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sepatutnya di analisis dan dipahami dari sisi manusia, bukan cuma dari sisi perkembangan ekonominya.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan sebaiknya di analisis serta jelas dari sisi manusia, bukan cuma dari sisi perkembangan ekonominya saja. Dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pembangunan mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan bertujuan dibuat untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, bukan cuma untuk meningkatkan pemasukan mereka. Oleh sebab itu, konsep pembangunan manusia wajib berpusat pada penduduk secara komprehensif serta bukan cuma aspek ekonomi semata.

3. Pembangunan manusia mengamati bukan cuma pada upaya tahapan kapasitas manusia, namun juga pada upaya menggunakan kapasitas manusia tersebut secara maksimal.
4. Pembangunan manusia didukung 4 pilar pokok, yakni produktivitas, pemerataan, berkesinambungan serta pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar untuk menentukan tujuan pembangunan serta dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk pencapaiannya. Berawal dari konsep diatas, penduduk yaitu tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai fasilitas untuk memperoleh tujuan tersebut.

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan manusia terdapat 4 perihal pokok yang dicermati ialah:

1. Produktivitas Penduduk wajib meningkatkan produktivitas serta partisipasi penuh dalam proses penciptaan pemasukan serta nafkah. Sehingga pembangunan ekonomi yakni bagian dari modal pembangunan manusia
2. Pemerataan Penduduk mempunyai peluang yang sama yakni memperoleh akses terhadap sumber energi ekonomi serta sosial. Seluruh hambatan yang memperkecil peluang untuk mendapatkan akses tersebut harus dihilangkan, sehingga mereka bisa mengambil khasiat dari kesempatan yang ada serta berpartisipasi dalam aktivitas produktif yang dapat meningkatkan mutu hidup.
3. Berkesinambungan Akses terhadap sumber energi ekonomi dan sosial wajib ditentukan tidak hanya untuk generasi yang akan datang. Seluruh sumber energi manusia serta area senantiasa diperbaiki.

4. Pemberdayaan Penduduk wajib berpartisipasi dalam keputusan dan proses yang memastikan arah kehidupan mereka dan untuk berpartisipasi bersama mengambil keputusan dalam proses pembangunan. Sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui 3 pendekatan dimensi dasar. Dimensi yang dimaksud yakni mencakup usia panjang yang diatur dengan tingkat harapan hidup, pengetahuan yang diatur dalam rata-rata dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua per tiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga) dan penghasilan yang diatur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan.

Dengan tiga ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap sekitar 160 negara, maka *Human Development Indeks* nya dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Negara atas pembangunan manusia yang rendah (*Low Human Development*) bila nilai *Human Development Indeks* berkisar antara 0,0 hingga 0,50.
2. Negara atas pembangunan manusia yang menengah (*Medium Human Development*) bila nilai maka *Human Development Indeks* berkisar antara 0,51 hingga 0,79.
3. Negara atas pembangunan manusia yang tinggi (*High Human Development*) bila nilai maka *Human Development Indeks* berkisar antara 0,80 hingga 1,027. Ketiga dimensi ini memiliki pengertian besar karena terkait banyak faktor. Pada laporan pertamanya, UNDP mengukur dimensi kesehatan dengan memakai angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk

mengukur dimensi pengetahuan digunakan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas.

B. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

United Nations Programme (UNP) menerbitkan laporan mengenai masalah pembangunan sumber daya manusia yang diukur dalam ukuran kuantitatif yang biasa disebut *Human Development Indeks (HDI)*.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi maka Human Development Indeks adalah sebagai berikut:

- a) *Longevity*, di ukur atas variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau infant mortality rate.
- b) *Educational Achievement*, diukur atas dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- c) *Access to resource*, dapat di ukur secara makro dengan melalui PDB riil perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Komponen - komponen yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) antara lain:

1. Derajat kesehatan serta panjang usia yang terbaca dari angka harapan hidup, parameter kesehatan atas penanda angka harapan hidup, memperkirakan keadaan sehat serta berusia panjang.
2. Pendidikan yang di ukur atas angka melek huruf serta lamanya sekolah, mengukur manusia yang pintar, kreatif, terampil, serta bertakwa.

3. Pendapatan yang di ukur atas daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), parameter pendapatan dengan penanda daya beli 13 masyarakat, mengukur manusia yang mandiri serta mempunyai akses buat layak.

Kesimpulan dari komponen yang bisa mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah:

- a) Indeks Kesehatan

Tahun 1948 *World Health Organization* melaporkan bahwa kesehatan yakni sesuatu kondisi tubuh atau mental sosial keamanan serta bukan cuma saja penyakit ataupun kekurangan salah satu penanda yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia yakni indeks kesehatan yaitu angka harapan hidup seseorang sejak lahir yang dijadikan alat ukur kesehatan suatu individu di suatu setiap daerah. Angka harapan hidup juga bisa menunjukkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam masyarakat, karena dapat dilihat sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Angka Harapan Hidup yaitu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup dapat dilihat dengan umur rata-rata yang dihasilkan seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk angka harapan hidup yang rendah di satu daerah menunjukkan pembangunan kesehatan belum berhasil, dan semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Sementara itu dalam

menghitung indeks harapan hidup digunakan 14 nilai maksimum harapan hidup sesuai standar United Nation Development Programme, dimana angka tertinggi bisa menjadi batas atas, untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar *United Nation Development Programme*). Usia harapan hidup dapat berjalan panjang jika status kesehatan, gizi, dan lingkungan yang baik. Sektor kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar seseorang akan kesehatan meliputi perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan yang dimana merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar (Dianaputra & Aswitari, 2017).

- b) Indeks Pendidikan Tanda yang digunakan untuk mengukur indeks pendidikan merupakan rata-rata lama sekolah serta angka melek huruf. Kedua tanda pendidikan ini muncul bersama harapan bisa mencerminkan tingkat pengetahuan, dimana proposisi penduduk yang mempunyai keahlian baca tulis. Populasi yang digunakan yakni penduduk berumur 15 tahun ke atas sebab pada kenyataannya penduduk umur tersebut terdapat yang mengakhiri sekolah. Batas ini dibutuhkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sesungguhnya mengingat penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah dan hendak sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.

Teori *Human Capita*; membahas bahwa masyarakat yang berpendidikan yakni penduduk usia produktif, Teori Human Capital 15

menekankan dengan cara apa pendidikan meningkatkan teori produktivitas dan efisiensi pekerja bersama untuk meningkatkan tingkat stok kognitif kemampuan pekerja manusia produktif secara ekonomi, yang merupakan produk dari kemampuan bawahan dari investasi pada manusia. Penyedia pendidikan formal dipandang sebagai investasi modal manusia, yang dianggap sama atau bahkan lebih berharga dari modal fisik (Rachmawati et al., 2021).

- c) Indeks Daya Beli Secara sederhana perlu melihat kualitas pembangunan manusia, terdapat dua pendapat Ramirez (1998), Pertama, bahwa kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui kegiatan rumah tangga dan pemerintah, kegiatan rumah tangga yang memiliki partisipasi langsung atas penghasilan manusia antara lain kecenderungan rumah tangga untuk membelanjakan penghasilan bersih untuk memenuhi kebutuhan (pola konsumsi), tingkat dan distribusi penghasilan antar rumah tangga dan semakin tinggi tingkat pendidikan terutama pendidikan perempuan maka semakin positif bagi pembangunan manusia berkaitan dengan andil yang tidak kecil dalam mengatur biaya rumah tangga. Kedua, pembangunan manusia yang tinggi untuk mempengaruhi perekonomian dengan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Pendidikan dan kesehatan masyarakat sangat menentukan keahlian untuk mengelola dan menyerap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi

C. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia bisa dimanfaatkan mengenai sebagai berikut:

- a) Untuk mengalihkan inti atensi para pemilik keputusan, media beserta organisasi non pemerintah dari pemakai statistik ekonomi biasa, supaya lebih menegaskan pada pencapaian manusia. Indeks pembangunan manusia diciptakan supaya menegaskan apabila manusia serta segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama jika menilai pembangunan suatu negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.
- b) Untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah atau Negara.
- c) Untuk menampilkan perbedaan antar negara, di antara provinsi atau negara bagian di antara gender dan kelompok sosial ekonomi lainnya.

D. Indikator Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

1. Hubungan Indeks Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi Menurut *United National Development Programme* (UNDP), pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai salah satu penanda kesuksesan pembangunan dalam bidang kesehatan. Apabila usia harapan hidup mengalami peningkatan hingga bisa membagikan gambaran membaiknya keadaan sosial ekonomi penduduk, kesehatan beserta lingkungan. Demikian pula sebaliknya apabila terjalin penurunan keadaan ekonomi penduduk dalam satu masa berdampak penurunan usia harapan hidup.

Kesehatan yakni keperluan mendasar untuk setiap manusia karena jika tanpa kesehatan warga tidak bisa menghasilkan sesuatu produktivitas bagi negara ataupun daerahnya. Kegiatan ekonomi sesuatu negeri hendak berjalan apabila ada jaminan kesehatan buat penduduknya.

Terpaut dengan teori modal manusia, modal manusia bermanfaat signifikan, apabila lebih bermakna dari pada faktor-faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan masyarakat sangat menentukan kesejahteraan masyarakat untuk mengendalikan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik yang berhubungan dengan teknologi hingga untuk pertumbuhan ekonomi. Kesehatan yakni kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan penduduk tidak dapat menciptakan suatu produktivitas bagi negara. Aktivitas ekonomi suatu negara akan bergerak apabila ada jaminan kesehatan bagi setiap masyarakatnya.

2. Hubungan Indeks Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi
Pendidikan membagikan sumbangan langsung atas pertumbuhan penghasilan nasional melalui kenaikan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan berguna menyediakan salah satu input dalam metode produksi, yakni tenaga kerja supaya dapat bekerja dengan baik karena kualitasnya. Hal ini selanjutnya akan memaksa peningkatan output yang diharapkan bermuara pada keamanan masyarakat. Pendidikan yaitu tujuan pembangunan yang mendasar. Oleh sebab itu pendidikan memegang peran sentral. Pendidikan merupakan hal pokok untuk mencapai kehidupan yang menggembirakan dan bermakna. Ikatan pendidikan imbang dengan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal mempunyai peran penting dalam memecahkan kemiskinan dalam jangka lama, baik itu secara serentak untuk membenahi tingkat produktivitas atau tingkat efisiensi pada

dasarnya. Karena sejatinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka ia akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi pula.

3. Indeks daya beli dengan Pertumbuhan Ekonomi Dalam jangkauan yang lebih luas standar hidup layak mencerminkan tingkat keamanan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai efek semakin membaiknya ekonomi. Kepintaran daya beli masyarakat atas sejumlah keinginan pokok yang dilihat dari rata-rata banyaknya konsumsi per kapita sebagai strategi pendapatan yang mewakili perolehan pembangunan untuk hidup layak, efisiensi pada dasarnya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggilah produktivitas yang dimilikinya.

4. Indeks daya beli dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam jangkauan yang lebih luas standar hidup layak mencerminkan tingkat keamanan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai efek membaiknya ekonomi. Daya beli masyarakat atas sejumlah keinginan pokok yang dilihat dari rata rata banyaknya konsumsi per kapita sebagai startegi pendapatan yang mewakili perolehan pembangunan untuk hidup layak.

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya

faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro (Boediono, 2012).

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah

yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono, 2012).

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut

1. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum,

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

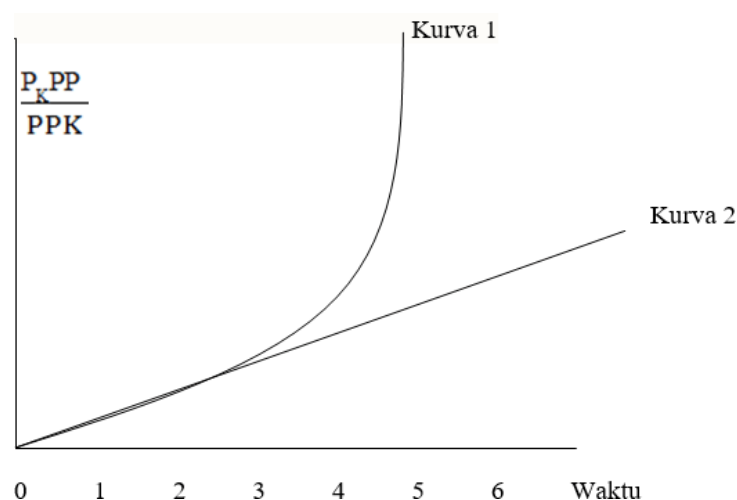
Keterangan:

GpC : Pengeluaran Pemerintah Per kapita

YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

i : Indeks Waktu

Hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Sehingga Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri dan hubungan industri dengan masyarakat akan semakin rumit dan kompleks. Sehingga potensi terjadinya kegagalan eksternalitas negatif semakin besar. (Mangkoesoebroto, 1994).



Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Menurut Wagner ada 5 hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut : secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. (Mangkoesoebroto, 1993)

2. Teori Peacock Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh

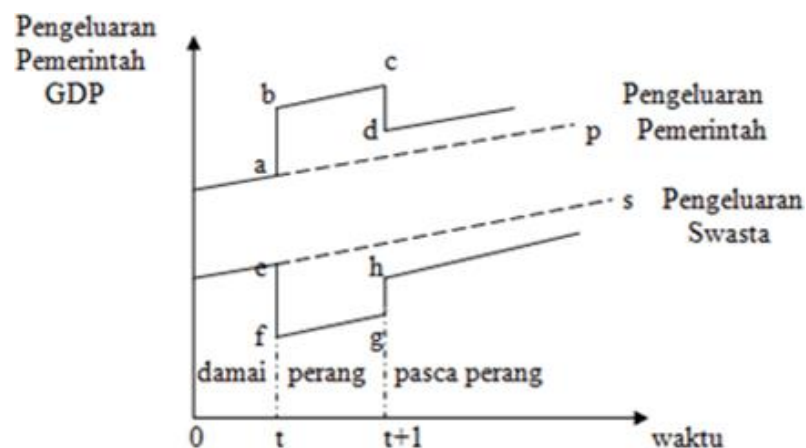
pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman adalah pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya

perang dan ini disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (*concentration effect*).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi seperti tangga. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

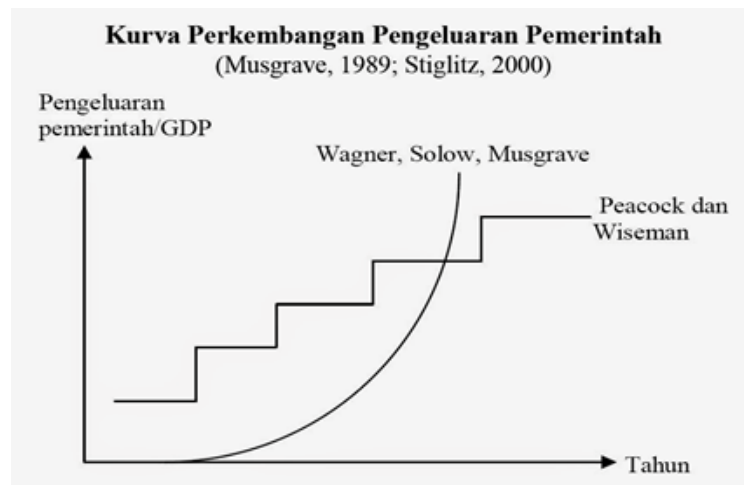


Gambar 2.2 Kurva Teori Peacock dan Wiseman

Dalam keadaan normal, t ke $t+1$, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun $t+1$, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk

mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Kenaikan tarif pajak tersebut dimaklumi oleh masyarakat sehingga tingkat toleransi pajak meningkat dan pemerintah dapat memungut pajak yang lebih besar tanpa menimbulkan gangguan dalam masyarakat. Secara grafik, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman bukanlah berpola seperti kurva mulus berslope positif sebagaimana tersirat dalam pendapat Rostow dan Musgrave. Melainkan berslope positif dengan bentuk patah-patah seperti tangga yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Wagner,

Solow, Musgrave Peacock & Wiseman Tahun Pengeluaran Pemerintah/ GDP Bird, efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

3. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb

2.2. Regulasi Kebijakan Mendukung IPM

Menurut Bappenas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktulahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan indikator tingkat pembangunan manusia yang dihitung berdasarkan perbandingan angka harapan hidup, standar hidup layak dan pendidikan.

Proses pelaksanaan program peningkatan IPM dilandasi oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024. Peraturan Menteri Nomo 11 tahun 2020 Pasal 1 menegaaskan bahwa Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka menengah. RPJMN 2020-2024 merupakan tahap keempat dari tahapan RPJPN 2005-2025 yang memuat penetapan target Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Kementerian PPN/Bappenas merupakan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional berkewajiban untuk mengawal tercapainya sasaran dan target kedua hal tersebut.

Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan

memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarusutamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarusutamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarusutamaan tersebut adalah:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyesuaian dengan pembangunan nasional.

Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka 27 disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional.

B. Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*).

Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis bukti (*evidence based planning*) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan

Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

3. Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai *enabler* pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga

berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 29 yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.

5. Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel.

Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidence based planning*), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan

Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan *platform online*.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang terkait langsung akan penelitian ini yang dilakukan. Hasil penciptaan dari penelitian – penelitian terdahulu dapat mempersembahkan wawasan ilmu yang luas mengenai variabel variabel yang terkait dengan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Deli Serdang. Adapun penelitian terdahulu dapat dinilai pada table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
(Augustpaosa Nariman, 2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara	penelitian ini menggunakan data panel sekunder yang terdiri dari data time series dan cross section. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda software eviews 9 dengan metode <i>fixed effect models</i>	hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan dan tidak berpengaruh secara signifikan. Variabel kepadatan penduduk dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel jumlah guru dan murid dan rasio guru per siswa mempengaruhi variabel indeks pembangunan manusia secara signifikan dan positif.

(Latuconsina, 2017)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel	Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi panel data	Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada tiap tipologi wilayah pengembangan Kabupaten Malang, diantaranya: faktor jumlah sarana kesehatan, jumlah perawat-bidan dan kepadatan penduduk pada tipologi I (urban); faktor rasio sekolah per siswa SD dan kepadatan penduduk pada tipologi II (peri-urban); dan faktor jumlah perawat-bidan pada tipologi III (rural)
(Nugroho, 2016)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistic terhadap dua kelompok tersebut.	Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara dua kelompok daerah tersebut. Pada kelompok daerah dengan angka IPM tinggi, terlihat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok daerah dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. Adapun pertumbuhan ekonomi terlihat menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah baik dari

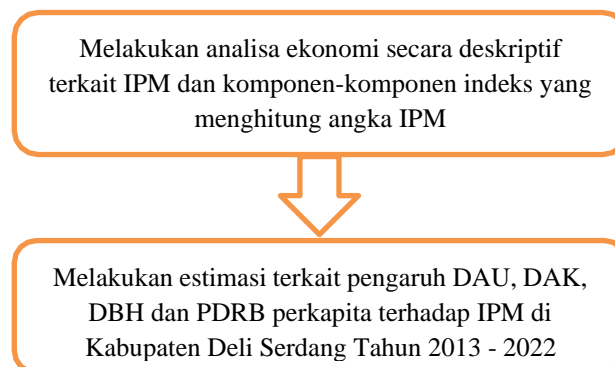
			kelompok daerah dengan IPM tinggi maupun rendah
(Dewi & Sutrisna, 2014)	Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali	Metode analisis yang digunakan adalah metode asosiatif dan teknik analisis regresi data panel dengan metode <i>Pooled Least Square</i>	erdasarkan hasil olah data, diperoleh bahwa indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sedangkan hasil uji parsial diperoleh bahwa indeks pendidikan dan indeks daya beli masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan indeks kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Adanya hubungan positif antara pembangunan

			<p>manusia dan pertumbuhan ekonomi maka kebijakan pemerataan pembangunan manusia harus menjadi perhatian Pemerintah.</p>
<p>(Pratowo, 2012)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia</p>	<p>Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan menganalisis data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian keempat variabel diduga mempengaruhi IPM di Jawa Tengah provinsi, dengan asumsi kondisi ceteris paribus bahwa: Belanja Pemerintah Kabupaten pengaruh positif yang signifikan terhadap IPM. Elastisitas IPM meningkat karena meningkat pengeluaran sebesar 0,032. Jika belanja daerah naik 1 persen, maka rata-rata IPM akan naik sekitar 0,032 persen. Rasio gini berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Elastisitas meningkat IPM sehubungan dengan penurunan gini ratio adalah sebesar -0,034, jika gini ratio turun 1 persen, maka rata-rata IPM akan naik sekitar 0,034 persen. Proporsi bukan makanan</p>

			<p>pengeluaran berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. HDI meningkatkan elastisitas sehubungan dengan meningkatkan proporsi pengeluaran bukan makanan sebesar 0,172. Jika proporsi pengeluaran bukan makanan naik 1 persen, maka rata-rata IPM akan naik sekitar 0,172 persen. Ketergantungan rasio berpengaruh negatif secara signifikan terhadap IPM. Elastisitas peningkatan IPM sehubungan dengan a pengurangan rasio ketergantungan adalah sebesar -0,062. Ketika rasio ketergantungan turun 1 persen, maka rata-rata IPM akan naik sekitar 0,062 persen</p>
--	--	--	--

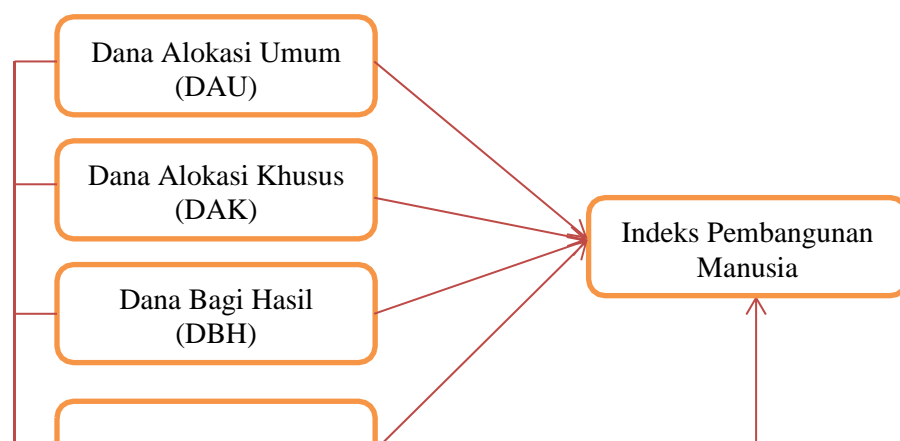
2.4. Kerangka Penelitian

2.3.1. Tahapan Penelitian



Gambar 2.4 Tahapan Penelitian

2.3.2. Kerangka Konseptual



PDRB Perkapita

Gambar 2.5 Kerangka Konseptual

2.3.3. Hipotesis

1. Terdapat Pengaruh yang positif dan signifikan antara DAU, DAK, DBH dan PDRB Perkapita terhadap IPM di Kabupaten Deli Serdang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kuantitatif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat verbal dan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang akan disajikan adalah data data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu.

3.2. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan acuan dari tinjauan Pustaka yang digunakan untuk melakukan pessenelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat di sesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan PDRB perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data	Keterangan Variabel
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat kualitas hidup Masyarakat dalam pembangunan ekonomi (Nilai)	https://deliserdangkab.bps.go.id/	Variabel Terikat
Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Umum (dalam satuan rupiah)	https://sumut.bps.go.id/sumut.bps.go.id	Variabel Bebas
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Alokasi DAK (dalam satuan rupiah)	https://sumut.bps.go.id/	Variabel Bebas
Dana Bagi Hasil (DBH)	Alokasi DBH berdasarkan (dalam satuan rupiah)	https://sumut.bps.go.id/	Variabel Bebas

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRBKAP)	Total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu (Ribu rupiah)	https://sumut.bps.go.id/	Variabel Bebas
--	---	---	----------------

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang (Provinsi Sumatera Utara) terkonsentrasi pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlokasi di JL. Karya Utama, Perbakaran, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

b. Waktu Penelitian

Jangka waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini hingga tersusunnya hasil penelitian skripsi adalah selama bulan Mei hingga Agustus tahun 2023

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang di ukur dalam numerik. Pada umumnya data kuantitatif yang bersifat data nominal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Data dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), PDRB Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2018). Data

Sekunder dalam penelitian ini diambil dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi, dengan cara pengambilan yang telah dipublikasi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

3.6. Teknik Analisis

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dimana, data sekunder akan dikumpulkan dan disajikan menggunakan diagram, kurva atau tabel yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif ini akan menganalisis terkait perkembangan IPM dan komponen-komponen indeks yang menghitung angka IPM.

3.6.2. Metode Analisis Model Ekonometrika

A. Model Estimasi

Penelitian ini akan mengestimasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara menggunakan data runtut waktu (*Time Series*) dari tahun 2013-2022.

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 PDRBKAP_t + e$$

Dimana :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

PDRBKAP = PDRB Perkapita

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien

t = Banyaknya waktu

e = *term of error*

Setelah mengevaluasi model penelitian, ditentukan nilai dan ukuran masing-masing parameter pada model persamaan di atas. Kemudian ditentukan nilai parameter positif dan negatif untuk menguji hipotesis penelitian.

B. Metode Estimasi

Metode estimasi penelitian ini adalah mengestimasi semua variabel yang diamati dengan menggunakan data runtut waktu selama periode 10 tahun. Analisis tren periode ini dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau metode OLS (*Ordinary Least Square*) berupa regresi linier berganda (*multiple regression model*), yang disajikan dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Asumsi yang mendasari model regresi linier menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance term = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance term $\text{COV}(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : t \neq j$
3. Sifat homoskedastisitas dari disturbance term $\text{Var}(\epsilon_t) = \sigma^2$
4. Covariance antar ϵ_t dari setiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya,

variabel-variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya.

Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) (Gujarati, 2016).

C. Tahap Analisis

1. Penaksiran

a. Kolerasi (r)

Koefisien korelasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat dengan variabel bebas yang diamati. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi mulai -1 sampai +1. Nilai r -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut, jika nilai $r = 0$, mengindikasikan tidak ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara variabel-variabel tersebut.

b. Uji Koefisien Determinasi (D)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi

masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau adjusted R2 (Kuncoro, 2013).

2. Pengujian (*Test Diagnostic*)

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2016). Uji t dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 secara *individual* terhadap Y.

Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. dimana t hitung adalah :

$$t_h = \frac{\beta_i}{se - \beta_i}$$

dimana:

β_1 = Jumlah Penduduk

β_2 = Produk Domestik Regional Bruto

β_3 = Indeks Pembangunan Manusia

β_4 = Pengangguran

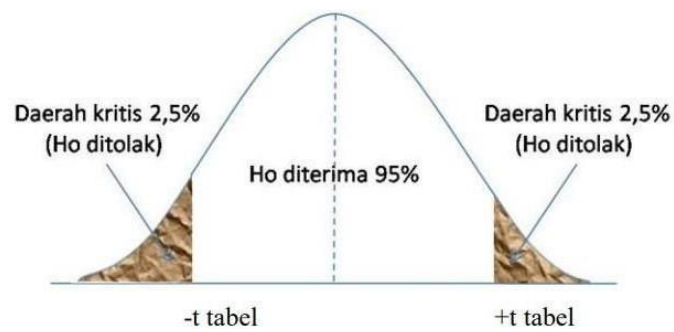
se β_i = Standar eror β_i

Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel = $\pm t(\alpha/2, n - 1)$.

Kriteria Uji :

Terima H_0 jika $- t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$, hal lain tolak H_0 atau dalam

distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Uji t-hitung

Kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 atau tolak H_0

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah :

$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

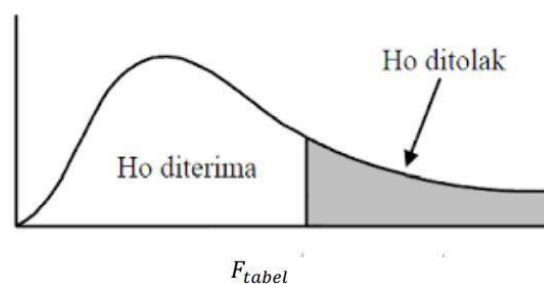
Nilai F_{hitung} akan dibandingkan dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$ dengan

derajat kesalahan $\alpha = 10\%$

1. Kriteria Uji:

Terima jika H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Uji f-hitung

1. Kesimpulan terima atau tolak H_0 :

Memberikan kesimpulan sesuai kriteria uji maka terima H_0 .

c. Asumsi Klasik

Metode OLS mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS yang BLUE (*Blue Linear Unbiased Estimator*) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan criteria ekonometrika, yaitu:

- 1). Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas).
- 2). Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas).
- 3). Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

d. Multikolinieritas

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2016).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing- masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam

model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi *auxiliary* maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas.

e. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “*reliable*” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2016). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observasion R-Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

f. Autokolerasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2016).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Durbin Watson Test*. Dimana apabila di dan du adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai *Durbin Watson* berada $DW < 4$ -du maka autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Gujarati, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis dan Batas Administrasi

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 2°57' Lintang Utara sampai 3°16' Lintang Utara dan 98°33' Bujur Timur sampai 99°27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut. Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain:.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh,
- Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Di Kabupaten Deli Serdang dikenal hanya dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin yang bertiup tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin yang banyak mengandung uap air berhembus sehingga terjadi musim hujan. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober Nopember.

Menurut catatan Stasiun Klimatologi Sampali, pada tahun 2017 terdapat rata-rata 16,17 atau 16-17 hari hujan dengan rata-rata volume curah hujan sebanyak rata-rata 179,42 mm. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan September yaitu 322

mm. Sedangkan curah hujan paling kecil terjadi pada bulan Februari sebesar 21 mm.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan	
	Luas (Km2)	Persentase
	2022	2022
Gunung Meriah	76,65	3,07
S.T.M. Hulu	223,38	8,94
Sibolangit	179,96	7,2
Kutalimbaru	174,92	7
Pancur Batu	122,53	4,91
Namo Rambe	62,3	2,49
Biru-Biru	89,69	3,59
S.T.M. Hilir	190,5	7,63
Bangun Purba	129,95	5,2
Galang	150,29	6,02
Tanjung Morawa	131,75	5,27
Patumbak	46,79	1,87
Deli Tua	9,36	0,37
Sunggal	92,52	3,7
Hampan Perak	230,15	9,21
Labuhan Deli	127,23	5,09
Percut Sei Tuan	190,79	7,64
Batang Kuis	40,34	1,62
Pantai Labu	81,85	3,28
Beringin	52,69	2,11
Lubuk Pakam	31,19	1,25
Pagar Merbau	62,89	2,52
Deli Serdang	2 497,72	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Deli Serdang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kecamatan dengan luas wilayah terbesar adalah kecamatan Hampan Perak dengan luas wilayah 230,15 Km² atau 9,21% dari luas wilayah Kabupaten Deli Serdang. Urutan kedua ditempati oleh kecamatan STM Hulu dengan luas wilayah 223,38 KM² atau 8,94% dari luas wilayah Deli Serdang. Sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah kecamatan Deli Tua dengan luas wilayah 9,36 KM² atau 0,37% dari total wilayah Deli Serdang.

4.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Deli Serdang berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 adalah 1.931.441 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap dan termasuk urutan kedua terbesar se Sumatera Utara setelah Kota Medan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2021 berdasarkan angka terakhir SP 2020 adalah 0,69 persen per tahun.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Gunung Meriah	1 685	1 675	1 569	1 546	3 254	3 221
S.T.M. Hulu	6 710	6 687	6 942	6 907	13 652	13 594
Sibolangit	9 920	9 896	10 133	10 107	20 053	20 003
Kutalimbaru	18 046	17 965	18 404	18 355	36 450	36 320
Pancur Batu	47 108	46 855	47 064	46 902	94 172	93 757
Namo Rambe	19 888	19 813	19 983	19 944	39 871	39 757
Biru-Biru	19 923	19 736	19 623	19 552	39 546	39 288
S.T.M. Hilir	16 631	16 588	16 684	16 627	33 315	33 215
Bangun Purba	12 414	12 307	12 274	12 207	24 688	24 514
Galang	36 014	35 672	35 133	34 921	71 147	70 593
Tanjung Morawa	114 940	113 715	112 456	111 549	227 396	225 264
Patumbak	50 165	49 876	48 579	48 427	98 744	98 303
Deli Tua	30 084	29 893	29 839	29 674	59 923	59 567
Sunggal	122 133	121 394	121 652	121 012	243 785	242 406
Hamparan Perak	83 838	83 438	80 592	80 427	164 430	163 865
Labuhan Deli	34 426	34 197	33 380	33 224	67 806	67 421
Percut Sei Tuan	205 075	203 830	203 695	201 504	408 770	405 334
Batang Kuis	33 608	33 259	32 586	32 329	66 194	65 588
Pantai Labu	25 569	25 354	24 303	24 131	49 872	49 485
Beringin	31 164	30 854	30 609	30 345	61 773	61 199
Lubuk Pakam	44 284	44 055	44 877	44 753	89 161	88 808
Pagar Merbau	20 050	19 980	19 934	19 892	39 984	39 872
Deli Serdang	983 675	977 039	970 311	964 335	1 953 986	1 941 374

Sumber : Badan Pusat Statistik Deli Serdang, 2022

Jumlah penduduk Deli Serdang keadaan Tahun 2022 diperkirakan sebesar 1.953.986 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 782 jiwa per km². Jumlah rumah tangga sebanyak 453.533 rumah tangga. Setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2022 lebih banyak dari

penduduk perempuannya dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,38 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Pada tahun 2022, Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dengan tingkat persebaran penduduk sebesar 20,92 persen sedangkan Kecamatan Gunung Meriah adalah yang terkecil yaitu 0,17 persen. Untuk Kecamatan terpadat urutan pertama adalah Kecamatan Deli Tua dengan 6.402 penduduk per km² disusul Kecamatan Sunggal dengan kepadatan 2.635 jiwa per km² dan yang terjarang adalah Kecamatan Gunung Meriah yang hanya 42 jiwa per km².

4.2. Perkembangan IPM Yang Telah Dicapai Dari Proses Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Deli Serdang

4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Deli Serdang

Sebagai indikator komposit, jika IPM disajikan tersendiri maka hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu wilayah. Manfaat IPM dapat diperluas jika dilakukan perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Kemajuan atau pencapaian IPM antar waktu di suatu wilayah seperti kabupaten atau provinsi serta perbandingannya dengan pencapaian di wilayah lain juga dapat dianalisis. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Tabel 4. 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 - 2022

Kabupaten Kota		Sumatera Utara	Deli Serdang
Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)	2022	72.71	76.19
	2021	72.00	75.53
	2020	71.77	75.44
	2019	71.74	75.43
	2018	71.18	74.92

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023

Indeks Pembangunan Manusia Deli Serdang mencapai 75,53 pada tahun 2022. Dengan capaian IPM itu, Deli Serdang berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Deli Serdang pada posisi 4 (empat) dari 33 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Peningkatan pembangunan manusia terus terjadi setiap tahun. Grafik di atas menunjukkan kenaikan IPM Kabupaten Deli Serdang selama periode 2018 – 2022. Apabila dilihat lebih jauh, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan IPM masih positif namun terdapat akselerasi pertumbuhan IPM yang semakin melambat. Tahun 2018 merupakan tahun dengan percepatan pertumbuhan IPM tertinggi. Sementara itu tahun 2020 merupakan tahun dengan percepatan pertumbuhan IPM terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

4.2.2. Posisi Kabupaten Deli Serdang

Jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang berada pada posisi ke-empat dari tiga puluh tiga kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM tertinggi yaitu Kota Medan sebesar 81,21. Posisi kedua dan ketiga berturut turut adalah Kota Pematang Siantar 79,17 dan Kota Binjai 76,01. Deli Serdang merupakan IPM tertinggi untuk status daerah Kabupaten.

Di antara kabupaten/kota di Sumatera Utara, Kota Medan merupakan satu-satunya yang berstatus IPM “sangat tinggi”. Kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” di antaranya adalah: Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Samosir, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Sibolga, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Binjai dan Padang Sidempuan.

Sementara itu, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Nias Utara, Tanjung Balai dan Gunung Sitoli berada pada status IPM posisi “sedang”.

Tabel 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Kabupaten / Kota	Nilai IPM
Sumatera Utara	72.71
Nias	63.69
Mandailing Natal	68.05
Tapanuli Selatan	70.92
Tapanuli Tengah	70.31
Tapanuli Utara	74.14
Toba Samosir	75.96
Labuhan Batu	72.92
Asahan	71.13
Simalungun	73.77
Dairi	72.56
Karo	75.36
Deli Serdang	76.19
Langkat	71.86
Nias Selatan	63.17
Humbang Hasundutan	70.32
Pakpak Bharat	68.85
Samosir	71.67
Serdang Bedagai	71.21
Batu Bara	69.51
Padang Lawas Utara	70.93
Padang Lawas	69.58
Labuhanbatu Selatan	72.16
Labuanbatu Utara	72.77
Nias Utara	63.75

Nias Barat	62.93
Sibolga	74.74
Tanjungbalai	69.86
Pematangsiantar	79.70
Tebing Tinggi	76.17
Medan	81.76
Binjai	76.95
Padangsidempuan	76.05
Gunungsitoli	70.23

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022

IPM terendah di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 62,93. Walaupun di tingkat provinsi Sumatera Utara IPM Deli Serdang menduduki rangking ke 4, namun angka IPM Deli Serdang lebih tinggi dibandingkan IPM Sumatera Utara yang hanya 72.71. IPM Kabupaten Deli Serdang merupakan yang tertinggi pada status daerah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, capaian IPM Kabupaten Deli Serdang selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dan mencapai 76.19 di tahun 2022. Nilai tersebut menunjukkan kemajuan dan keberhasilan dalam hal pembangunan sumber daya di Kabupaten Deli Serdang. Akselerasi pertumbuhan IPM cukup signifikan pada tahun 2017-2019, namun pertumbuhan mulai melambat pada tahun 2020-2021 yang salah satu penyebabnya adalah akibat Pandemi Covid-19.

4.2.3. Umur Harapan Hidup

Capaian IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Rata-rata bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup di Deli Serdang pada tahun 2022 mencapai usia 71,77 tahun.

Hidup lebih lama merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, salah satu faktornya diperlukan kesehatan yang lebih baik. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (e_0). Indikator UHH menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan di bidang kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.

UHH dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat, diharapkan kesempatan untuk bertahan hidup akan semakin besar. Sebaliknya, tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup. Umur Harapan Hidup berbanding terbalik dengan tingkat kematian bayi, artinya semakin rendah angka kematian bayi maka Umur Harapan Hidup akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya.

Tabel 4. 5 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 - 2022

Kabupaten Kota		Sumatera Utara	Deli Serdang
Angka Harapan Hidup (Tahun)	2022	69.61	72.07
	2021	69.23	71.77
	2020	69.10	71.73
	2019	68.95	71.61
	2018	68.61	71.31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2022

Tabel diatas memperlihatkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Deli Serdang selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada gambar tersebut terlihat bahwa AHH Kabupaten Deli Serdang selama periode 2018 - 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten. Artinya, harapan seorang bayi

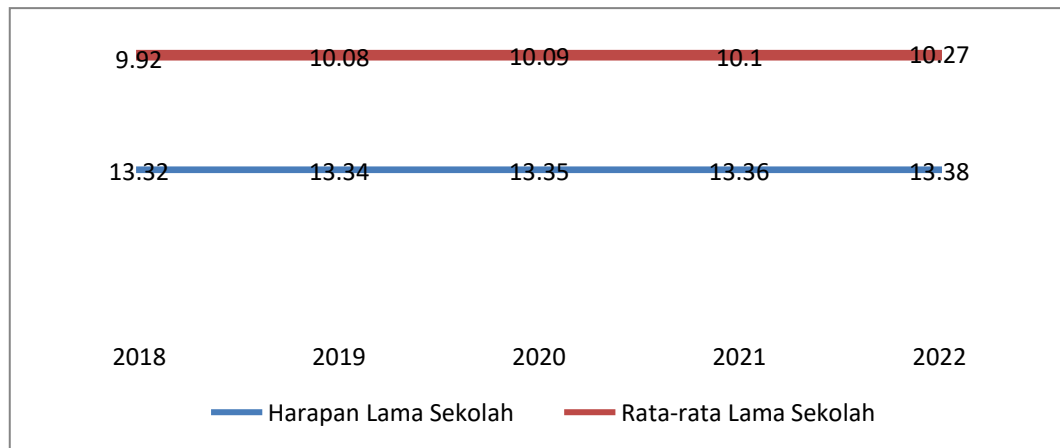
yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. UHH Deli Serdang pada tahun 2022 mencapai 72,07 tahun. Berarti setiap bayi di Kabupaten Deli Serdang yang dilahirkan pada tahun 2022, memiliki tingkat harapan untuk hidup sampai usia 72,07 tahun. Selama tahun 2018 – 2022, Umur Harapan Hidup saat lahir di Deli Serdang tumbuh rata-rata 0,06 persen per tahun.

4.2.4. Pendidikan

Pembangunan manusia tidak terlepas dari proses pendidikan. Pendidikan akan meningkatkan kreativitas dan imajinasi dan memperluas peluang seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan kecenderungan akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan secara umum juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Pendidikan juga mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk 25 tahun ke atas di Deli Serdang telah menempuh pendidikan hingga 10,10 tahun atau setara dengan mencapai SMA kelas I. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,36 tahun atau mencapai Diploma I.

Gambar 4. 1 Perkembangan HLS dan RLS Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022

Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik muda maupun tua di setiap jenjang pendidikan utamanya hingga SLTA, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Peningkatan partisipasi masyarakat ini, bisa dilihat dari peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk, yang keberhasilannya memerlukan dukungan keluarga, masyarakat luas dan pemerintah.

Sampai dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Deli Serdang telah mencapai 10,27 tahun atau setara dengan tamat SLTP atau masuk SLTA kelas 2. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,36 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Deli Serdang selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat. Pada tahun 2018, harapan lama sekolah di Deli Serdang sebesar 13,32

tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 13,38 tahun pada tahun 2022. Demikian juga dengan rata – rata lama sekolah, pada tahun 2018 sebesar 9,92 tahun meningkat hingga 10.10 tahun pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah sebesar 0,07 persen per tahun, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang tumbuh 0,10 persen per tahun.

4.3. Faktor Yang Mempengaruhi IPM Dikabupaten Deli Serdang

4.3.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas. Uji multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.1 Uji Multikolinearitas

Variabel	IPM	DBH	DAU	DAK	PDRB_PER KAPITA
IPM	1.000000	0.120730	0.595640	0.885765	0.933870
DBH	0.120730	1.000000	-0.237833	0.310410	0.138335
DAU	0.595640	-0.237833	1.000000	0.706974	0.362790
DAK	0.885765	0.310410	0.706974	1.000000	0.739421
PDRB_PE RKAPITA	0.933870	0.138335	0.362790	0.739421	1.000000

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

2. Uji Multikolinearitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian

ini adalah uji *Breusch Pagan Godfrey*. *Breusch Pagan Godfrey* adalah meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen. Menurut Ghozali. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut (Ghozali, 2020):

1. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_0 diterima yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak, H_a diterima yang artinya ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.2 Uji Heterokesdatisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	5.311923	Prob. F(4,6)	0.0357
Obs*R-squared	8.577777	Prob. Chi-Square(4)	0.0726
Scaled explained SS	1.407445	Prob. Chi-Square(4)	0.8429

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Berdasarkan data diatas terdapat nilai Prob. Obs*R-Square sebesar 0.0726 yang artinya lebih besar dari 0.05 ($>0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki gejala Heterokesdatisitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson	dL	dU	Kesimpulan

1.903658	0.4441	2.2833	Tidak ada autokorelasi
----------	--------	--------	------------------------

Sumber : Hasil Output Eviews, 2023.

4.3.2. Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel untuk mengetahui gambaran dari setiap variabel.

Tabel 4.4 Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: IPM				
Method: Least Squares				
Date: 08/18/23 Time: 11:20				
Sample: 2012 2022				
Included observations: 11				
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.68898	5.952738	10.69911	0.0000
DBH	-1.75E-08	3.23E-08	-0.543063	0.6067
DAU	1.22E-09	2.72E-09	0.449361	0.6689
DAK	4.17E-09	2.62E-09	1.590683	0.1628
PDRB_PERKAPITA	2.63E-07	5.68E-08	4.621836	0.0036
R-squared	0.968157	Mean dependent var		73.81818
Adjusted R-squared	0.946929	S.D. dependent var		1.845886
S.E. of regression	0.425239	Akaike info criterion		1.430624
Sum squared resid	1.084968	Schwarz criterion		1.611485
Log likelihood	-2.868429	Hannan-Quinn criter.		1.316616
F-statistic	45.60685	Durbin-Watson stat		1.903658
Prob(F-statistic)	0.000126			

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan regresi linier yang di hasilkan, yaitu:

$$Y = 63.68898 - 1.75E-08 \text{ DBH} + 1.22E-09 \text{ DAU} + 4.17E-09 \text{ DAK} + 2.63E-07$$

PDRB_Perkapita

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (c) = 63.6889 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai seluruh variabel independen sama dengan nol, maka variabel IPM (Y) sama dengan 63.6889.

2. Koefisien DBH adalah sebesar $-1.75E-08$, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan DBH mengalami kenaikan 1 rupiah maka tingkat IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,0000000175. Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai negatif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang negatif antara DBH dengan IPM. Artinya, jika DBH meningkat, maka IPM akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulastrri & Efendri, (2019) yang menyatakan Rendahnya jumlah DBH tersebut menyebabkan DBH belum mampu berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dilihat melalui kesehatan, pendidikan dan insfrastruktur. Rendahnya penerimaan DBH dikarenakan masih banyak daerah yang belum mampu memaksimalkan potensi pada daerahnya. DBH merupakan dana yang berasal dari pusat, yang mana pengalokasian DBH di serahkan kepada daerah, namun ada beberapa komponen DBH yang masih di atur oleh pemerintah pusat, sehingga belum bisa dialokasikan secara maksimal.
3. Koefisien DAU adalah sebesar $1.22E-09$, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan DAU mengalami kenaikan 1 rupiah maka IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0.00000000122. Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai positif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara DAU dengan IPM. Artinya, jika DAU meningkat, maka IPM akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh (Boling et al., 2023) dan menyatakan DAU berpengaruh positif terhadap IPM. Hal tersebut mengindikasikan penggunaan dana alokasi diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan fiskal daerah yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan

fungsi layanan dasar umum antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

4. Koefisien DAK adalah sebesar $4.17E-09$, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan DAK mengalami kenaikan 1 rupiah maka IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0.00000000417 Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai positif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara DAK dengan IPM. Artinya, jika DAK meningkat, maka IPM akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan disebabkan Proporsi dana alokasi khusus yang diterima masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dana alokasi umum. Pada dasarnya tujuan dana alokasi khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan beberapa arah kegiatan.
5. Koefisien PDRB Perkapita adalah sebesar $2.63E-07$, artinya berdasarkan penelitian ini jika variabel lain nilainya tetap dan PDRB Perkapita mengalami kenaikan 1 rupiah maka IPM akan mengalami kenaikan sebesar 0.000000263 Nilai *unstandardized coefficients* B bernilai positif, menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara PDRB Perkapita dengan IPM. Artinya, jika PDRB Perkapita meningkat, maka IPM akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Refrian, (2021) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap IPM karena meningkatnya PDRB mampu menambah sumber daya ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan manusia, utamanya dalam bentuk peningkatan pendapatan perkapita. Ketika pendapatan

perkapita mengalami kenaikan maka penduduk memiliki pilihan-pilihan yang lebih luas untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya sehingga pembangunan manusia dapat berlangsung lebih optimal.

4.2.3 Uji Hipotesis

A. Uji Parsial (t)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Berikut ini kriteria untuk pengambilan keputusan dalam penelitian ini:

- a. Jika nilai signifikan t statistik $> 0,05$ maka suatu variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan t statistik $< 0,05$, maka suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan angka dengan ketentuan $= 0,05$ dan dk $(n-2)$ atau $(11-2) = 9$ sehingga diperoleh nilai 2.26216, berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

1. DBH memiliki nilai signifikan sebesar $0.6067 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $-0,543063 < 2.01808$, artinya DBH secara parsial memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap IPM.
2. DAU memiliki nilai signifikan sebesar $0.6689 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $0,449361 < 2.01808$, artinya DAU secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM.
3. DAK memiliki nilai signifikan sebesar $0,1628 > 0,05$ dengan t hitung sebesar $1,590683 < 2.01808$, artinya DAK secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM.

4. PDRB perkapita memiliki nilai signifikan sebesar $0.0036 < 0,05$ dengan t hitung sebesar $4.621836 > 2.01808$, artinya PDRB perkapita secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

B. Uji Simultan (F)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variable dependen

Tabel 4.5 Uji Simultan (f)

F-statistic	45.60685
Prob(F-statistic)	0.000126

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa F tabel = 3.63 dan nilai F hitung sebesar 45.60685. Karena F hitung $>$ F tabel yaitu $45.60685 > 3.63$ maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa DBH, DAU, DAK, dan PDRB perkapita berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap IPM .

C. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Korelasi yaitu Hubungan liner antar dua variabel biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut.

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,968157
Adjusted R-squared	0,946929

Sumber: Hasil Data Olah Eviews (2023)

Dari tabel diatas besarnya angka R -Square (R^2) adalah 0,968157. Hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 96.8% atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang

digunakan dalam model yaitu DBH, DAU, DAK, dan PDRB perkapita mampu menjelaskan sebesar 96,8% terhadap variabel dependennya yaitu IPM. Sedangkan sisanya 3.2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi tersebut.

Menghasilkan manusia yang berkualitas tentu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah melakukan pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan alokasi anggaran atas seluruh daya dan dana yang dimiliki daerah untuk meningkatkan seluruh kebutuhan pelayanan publik sehingga tercapai kesejahteraan sosial masyarakat, tentunya dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah pelayanan publik menyangkut sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang menjadi inti dari konsep pembangunan manusia. Adanya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penganggaran pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengingatkan pada pembangunan dalam arti luas, bukan hanya dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, tetapi dimensi kesehatan dan pendidikan juga merupakan tujuan pembangunan yang fundamental. Kita tidak sependapat bila suatu negara yang mempunyai penduduk berpendapatan tinggi, tetapi tidak berpendidikan, kesehatannya tidak terpelihara dengan baik sehingga harapan hidupnya lebih singkat dari pada penduduk suatu negara yang lain di dunia telah mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi dari pada negara yang berpendapatan rendah tetapi usia harapan hidup dan kemampuan baca tulisnya lebih tinggi (Nehen, 2012).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Indeks Pembangunan Manusia Deli Serdang mencapai 75,53 pada tahun 2022. Dengan capaian IPM itu, Deli Serdang berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”. Tidak hanya itu, capaian ini juga sekaligus mengantarkan Deli Serdang pada posisi 4 (empat) dari 33 Kabupaten/Kota dalam pencapaian pembangunan manusia di Sumatera Utara.
2. DBH, DAU, DAK, dan PDRB perkapita berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap IPM

5.2 Saran

1. Diperlukannya perhatian khusus terhadap peningkatan IPM sebagai proses pembangunan ekonomi di kabupaten Deli Serdang.
2. Dapat Ditambahkan variabel variabel lain yang dapat mempengaruhi IPM di kabupaten Deli serdang agar penelitian mengenai IPM dapat lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2015). Edisi 5 Ekonomi Pembangunan. *UPP STIM YKPN*. Yogyakarta.
- Augustpaosa Nariman, H. T. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi IPM Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi*, 24(1), 144.
- Boediono, D. (2012). *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi Pertama*. Yogyakarta.
- Boling, J. M., Apriyanto, G., & Harmono. (2023). PENGARUH PENDAPATAN DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DALAM MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *Journal of Comprehensive Science*, 2(1), 31–41.
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh komponen indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3), 44443.
- Dianaputra, I. G. K. A., & Aswitari, L. P. (2017). Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(3), 165358.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. N. (2016). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2013). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi edisi 4. *Jakarta: Erlangga*.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.2.202-216>
- Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2016). ANALISIS PENGARUH DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP IPM DI KABUPATEN/KOTA EKS KARESIDENAN KEDU TAHUN 2012-2016. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 1(1), 100–113.
- Muqorrobin, M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*

(*JUPE*), 5(3).

- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.57>
- Pratowo, N. I. (2012). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 1(1), 15–31.
- Rachmawati, T., Lestari, R., Kamandanu, F. A., & Syahrobi, D. (2021). Edukasi pelaku UMKM Wisata Pantai Minang RUA sebagai upaya mewujudkan Sustainable Tourism. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 2(1), 27–34.
- Refrian, A. (Universitas B. (2021). Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun. *Jurnal Ilmiah*, 1–20.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks pembangunan manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- Sukirno, S. (2017). Ekonomi pembangunan: proses, masalah dan kebijakan, edisi kedua. *Prenada Media: Jakarta*.
- Sulastrri, E., & Efendri. (2019). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Kabupaten/Kota di Seluruh Provinsi Di Kalimantan Tahun Anggaran 2015-2019). *Keywords in Qualitative Methods*, 1–12. http://info.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/AKT/b06ca-jurnal_evi-sulastrri_17116021_final.pdf
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Makro Ekonomi (sembilan)*. Erlangga.

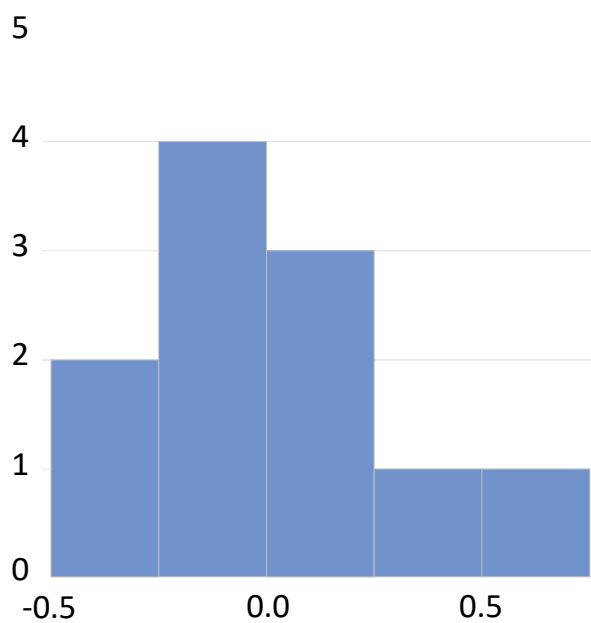
DATA PENELITIAN

	IPM	DBH (000)	DAU (000)	DAK (000)	PDRBKAP (Rupiah)
2012	70.88	72059714	1100013616	65478160	25081088.95
2013	71.39	57521710	1260755135	81867590	26746146.72
2014	71.98	56172938	1363811250	104687700	28111864.02
2015	72.79	49790884	1396297620	117332680	28932854.74
2016	73.51	70843988	1494821153	408339325	29837900.25
2017	73.94	59487838	1468561952	459510224	30734437.46
2018	74.92	68494799	1468561952	455242047	31703566.00
2019	75.43	56209665	1513584154	431040134	32323392.00
2020	75.44	61233707	1376847320	399214596	36611692.00
2021	75.53	66324276	1354889566	421879226	37176568.00
2022	76.19	66324276	1354889566	421879226	38674107.67

OUTPUT HASIL

Dependent Variable: IPM
 Method: Least Squares
 Date: 08/18/23 Time: 11:20
 Sample: 2012 2022
 Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	63.68898	5.952738	10.69911	0.0000
DBH	-1.75E-08	3.23E-08	-0.543063	0.6067
DAU	1.22E-09	2.72E-09	0.449361	0.6689
DAK	4.17E-09	2.62E-09	1.590683	0.1628
PDRB_PERKAPITA	2.63E-07	5.68E-08	4.621836	0.0036
R-squared	0.968157	Mean dependent var	73.81818	
Adjusted R-squared	0.946929	S.D. dependent var	1.845886	
S.E. of regression	0.425239	Akaike info criterion	1.430624	
Sum squared resid	1.084968	Schwarz criterion	1.611485	
Log likelihood	-2.868429	Hannan-Quinn criter.	1.316616	
F-statistic	45.60685	Durbin-Watson stat	1.903658	
Prob(F-statistic)	0.000126			



Series: Residuals
 Sample 2012 2022
 Observations 11

Mean	1.61e-15
Median	-0.139166
Maximum	0.589372
Minimum	-0.489310
Std. Dev.	0.329389
Skewness	0.368941
Kurtosis	2.102985
Jarque-Bera	0.618340
Probability	0.734056

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	5.311923	Prob. F(4,6)	0.0357
Obs*R-squared	8.577777	Prob. Chi-Square(4)	0.0726
Scaled explained SS	1.407445	Prob. Chi-Square(4)	0.8429

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/18/23 Time: 11:22

Sample: 2012 2022

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.041399	0.921350	2.215662	0.0686
DBH	-1.07E-08	5.00E-09	-2.141794	0.0760
DAU	-4.99E-10	4.21E-10	-1.184636	0.2810
DAK	1.26E-09	4.05E-10	3.107109	0.0209
PDRB_PERKAPITA	-3.10E-08	8.80E-09	-3.523514	0.0125
R-squared	0.779798	Mean dependent var	0.098633	
Adjusted R-squared	0.632996	S.D. dependent var	0.108644	
S.E. of regression	0.065817	Akaike info criterion	-2.300911	
Sum squared resid	0.025992	Schwarz criterion	-2.120049	
Log likelihood	17.65501	Hannan-Quinn criter.	-2.414918	
F-statistic	5.311923	Durbin-Watson stat	2.324000	
Prob(F-statistic)	0.035656			

	IPM	DBH	DAU	DAK	PDRB_PERKAPITA
IPM	1.000000	0.120730	0.595640	0.885765	0.933870
DBH	0.120730	1.000000	-0.237833	0.310410	0.138335
DAU	0.595640	-0.237833	1.000000	0.706974	0.362790
DAK	0.885765	0.310410	0.706974	1.000000	0.739421
PDRB_...	0.933870	0.138335	0.362790	0.739421	1.000000

Variance Inflation Factors

Date: 08/18/23 Time: 11:21

Sample: 2012 2022

Included observations: 11

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	35.43509	2155.561	NA
DBH	1.04E-15	248.5629	2.895295
DAU	7.40E-18	860.5771	5.776441
DAK	6.86E-18	50.15745	11.06740
PDRB_PERKAPITA	3.23E-15	197.8343	3.496422

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	5.311923	Prob. F(4,6)	0.0357
Obs*R-squared	8.577777	Prob. Chi-Square(4)	0.0726
Scaled explained SS	1.407445	Prob. Chi-Square(4)	0.8429

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/18/23 Time: 11:22

Sample: 2012 2022

Included observations: 11

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.041399	0.921350	2.215662	0.0686
DBH	-1.07E-08	5.00E-09	-2.141794	0.0760
DAU	-4.99E-10	4.21E-10	-1.184636	0.2810
DAK	1.26E-09	4.05E-10	3.107109	0.0209
PDRB_PERKAPITA	-3.10E-08	8.80E-09	-3.523514	0.0125

R-squared	0.779798	Mean dependent var	0.098633
Adjusted R-squared	0.632996	S.D. dependent var	0.108644
S.E. of regression	0.065817	Akaike info criterion	-2.300911
Sum squared resid	0.025992	Schwarz criterion	-2.120049
Log likelihood	17.65501	Hannan-Quinn criter.	-2.414918
F-statistic	5.311923	Durbin-Watson stat	2.324000
Prob(F-statistic)	0.035656		